

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selaku lembaga keuangan, bank memiliki fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana berupa simpanan dari masyarakat, kemudian menyalurkannya ke masyarakat yang memerlukan dengan sistem kredit. Begitupun halnya, seperti pada Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi satu di antara ragam bank di Indonesia berlandaskan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 juga melakukan fungsi intermediasi tersebut.

Penyaluran kredit dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada masyarakat di sekitar lokasi bank karena Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Komuniti. Penyaluran kredit ini dapat berupa modal kerja, investasi maupun konsumtif.

Penyaluran kredit di BPR cenderung lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Salah satu tujuan berdirinya BPR agar mempermudah masyarakat dalam mengatasi kesulitan dengan pinjaman kredit dan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Kredit merupakan pengadaan uang atau tagihan yang bisa disetarakan serupa tersebut. Hal ini berlandaskan kesepakatan atau kemufakatan proses meminjam antara bank beserta pihak peminjam, sehingga terdapat klausul yang mewajibkan pihak peminjam agar membayar hutang sesuai tenggat waktu definit beserta bunganya. Kepercayaan dan kehati-hatian merupakan prinsip dasar dari penyaluran kredit. Dalam penyaluran kredit bank perlu memiliki kepercayaan berdasarkan analisis komprehensif atas kesanggupan finansial beserta upaya nasabah debitur demi menuntaskan proses pelunasan hutang itu.

Dengan asas kehati-hatian saat penyaluran kredit beserta kemungkinan dalam penyaluran kredit timbul risiko yang melekat, maka sebelum disalurkan kredit, BPR wajib memahami nasabah debitur mengenai seluruh informasi tentang kapasitas dan kesediaan dalam mengembalikan dana yang telah diberikan bank.

Dalam penyaluran kredit, bank memperoleh keuntungan berupa bunga yang dibebankan ke debitur sebagai pihak yang memberikan balas jasa atas tersalurkannya kredit dari bank. Sedangkan bagi masyarakat selaku pihak peminjam atau bisa juga disebut debitur mendapat keuntungan dalam mengatasi kebutuhan keuangan secara cepat. Meski saling menguntungkan, pelaksanaan penyaluran kredit yang diproses oleh bank tidak selalu berjalan lancar seperti perjanjian sehingga tatkala pelaksanaannya bank memerlukan waktu untuk menganalisa kelayakan debiturnya dalam mengembalikan kredit. Meski sudah dianalisa terkadang tetap ditemui masalah setelah kredit diberikan. Seperti keterlambatan pembayaran angsuran, debitur sulit ditemui untuk mediasi terkait kejelasan membayar cicilan dengan pihak bank, dan tindakan wanprestasi yang memicu kredit macet serta kesulitan keuangan yang disebabkan karena problem keluarga.

Kredit macet merupakan peristiwa ketidakmampuan nasabah debitur membayar lunas kredit di bank secara akurat sesuai tenggang waktu. Kondisi itu dapat disebabkan oleh beragam faktor, misalnya penghasilan utama debitur lenyap, menghindar membayar secara terstruktur, dan sebagainya. Jika situasi kredit macet itu tidak segera dituntaskan maka berpotensi skor kredit debitur menjadi buruk. Dengan skor kredit yang buruk, maka potensi kesulitan debitur untuk mengajukan peminjaman di bank atau di tempat lain akan semakin besar.

Sedangkan dampak kredit macet bagi bank adalah memperburuk performa perusahaan. Jika hal ini dibiarkan, maka kondisi bank tidak akan sehat dan memperburuk reputasi bank itu sendiri. Oleh karena itu bank selain hati-hati dalam menganalisa, bank juga sangat memikirkan tingkat risiko produk kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya kebijakan mengenai prosedur penyaluran kredit agar kredit yang disalurkan dapat kembali. Salah satu produk kredit bank yang dianggap bank mempunyai tingkat risiko kredit macet yang rendah adalah kredit sertifikasi pendidik negeri. Hal ini karena para pendidik mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik negeri rutin yang dibayarkan

oleh pemerintah kepada pendidik, sehingga pendidik bisa melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti prosedur penyaluran kredit di PT. BPR Hasa Mitra Jawa Barat khususnya penyaluran kredit untuk sertifikasi pendidik negeri dengan judul “Prosedur Penyaluran Kredit Sertifikasi Pendidik Negeri di PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dirincikan pada latar belakang di atas, maka persoalan yang akan ditelaah dalam penulisan di antaranya:

1. Bagaimana prosedur penyaluran kredit sertifikasi pendidik negeri di PT. BPR Hasa Mitra Jawa Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam prosedur penyaluran kredit sertifikasi pendidik negeri di PT. BPR Hasa Mitra Jawa Barat?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam prosedur penyaluran kredit sertifikasi pendidik negeri di PT. BPR Hasa Mitra Jawa Barat?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi hanya fokus pada prosedur penyaluran kredit sertifikasi pendidik negeri, yaitu sertifikasi guru di PT. BPR Hasa Mitra Jawa Barat agar penelitian tidak meluas dan lebih terarah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami prosedur penyaluran kredit konsumtif sertifikasi pendidik negeri di PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat.
2. Untuk memahami hambatan prosedur penyaluran kredit konsumtif sertifikasi pendidik negeri di PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan prosedur penyaluran kredit konsumtif sertifikasi pendidik negeri di PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat.

Manfaat penelitian ini adalah

1. Merupakan target untuk menyelesaikan syarat untuk dapat lulus dalam program Diploma III (tiga) pada Prodi Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

2. Menerapkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan selama ini dan yang berhubungan dengan materi penulisan Tugas Akhir.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi mereka yang telah membaca Tugas Akhir ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengetahuan tentang perkembangan produk-produk dalam perbankan.
4. Bagi manajemen di PT. BPR Hasa Mitra Jawa Barat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai penyaluran kredit sertifikasi pendidik.

1.5 Metode Penelitian

Agar mendapat informasi dan data dalam mengelola prosedur penyaluran kredit sertifikasi pendidik negeri, maka dibutuhkan informasi dan data yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan metode-metode seperti berikut :

1. Studi Kepustakaan

Metode ini dilaksanakan melalui cara mengumpulkan dan mempelajari data serta teori pendukung dari bahan perkuliahan, jurnal, serta buku literatur yang berkaitan dengan perkara yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Penelitian dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung pada objek dan survei langsung pada PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat, tujuannya adalah mendapatkan data-data secara akurat serta relevan, yang dilakukan melalui cara:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Admin Kredit BPR Hasa Mitra Jawa Barat dan unit Account Officer untuk mendapatkan informasi secara konkret. Peneliti bukan memakai kaidah dasar wawancara terorganisasi, serta persiapan yang matang saat menghimpun informasi. Hanya menggunakan poin penting dari kasus saat melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi. Dalam wawancara tidak terstruktur, pengamat lebih banyak memahami secara saksama tentang hal yang dikisahkan/ diuraikan oleh responden, bersumber pada penjabaran tiap jawaban responden tersebut sehingga peneliti dapat mengajukan beragam

persoalan berikutnya yang lebih terkonsep pada suatu tujuan.

b. Observasi

Observasi telah direncanakan secara sistematis dimana peneliti terjun langsung pada objek peneliti, yaitu berkas terkait penyaluran kredit sertifikasi pendidik negeri di BPR Hasa Mitra Jawa Barat. Peneliti melakukan pelatihan kerja lapangan di Admin Kredit BPR Hasa Mitra Jawa Barat, di mana peneliti ditempatkan di unit Admin Kredit yang bertugas untuk mengorganisasi arsip administrasi kredit, dan iku serta mendukung pelaksanaan prosedur akad kredit.

1.6 Sistematis Penulisan

Agar pengkajian tetap terfokus dan terorganisasi, maka pembahasan akan dikelompokkan secara teratur dalam proses penulisan ini yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Di bab ini mengenai inti perkara secara umum yang termasuk penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Di bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, unsur kredit, prinsip penyaluran kredit.

BAB III: GAMBARAN UMUM MENGENAI PT BPR HASA MITRA JAWA BARAT

Di bab ini menguraikan perihal gambaran umum PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat antara lain, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk yang dihasilkan PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat

BAB IV: PEMBAHASAN

Di bab ini penulis mengupas terkait prosedur penyaluran kredit konsumtif sertifikasi pendidik negeri di PT BPR Hasa Mitra Jawa Barat, sistem penyaluran kredit konsumtif sertifikasi pendidik negeri, dan cara mengatasi hambatan penyaluran kredit konsumtif sertifikasi pendidik negeri.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini tersaji kesimpulan atas penjabaran yang penulis lakukan, serta mengantarkan saran yang dapat berfaedah dan membangun bagi pembaca.

